PERAN PROGRAM MBG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA

Chintia Catur Cahyarona[1)], Chairil Anwar[2)]
[1)]Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia
Email: chintiacahyarona@gmail.com
[2)]Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia
Email: chairilanwar.akn@unusida.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Free Nutritious Meal Program (MBG) and the Subsidized Program for Poor Groups (SPPG) in improving the welfare of lower-class workers in Indonesia. Human resource development is a key priority in addressing structural poverty caused by limited access to nutrition, education, and economic opportunities. The MBG and SPPG programs serve as government interventions through social policies that not only fulfill basic needs but also enhance the economic capacity of beneficiaries. This research employs a qualitative approach using a case study method involving 25 beneficiary families in Central Java and East Java. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that the MBG program contributes to improving family health and productivity through better nutritional intake. In addition, the reduction in household food expenditure allows families to allocate resources to more productive sectors, such as education and small-scale businesses. The program also stimulates local economic circulation through the involvement of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the distribution process. However, challenges remain, including targeting accuracy, limited management capacity, and low public awareness of balanced nutrition. Overall, the MBG and SPPG programs align with Keynesian theory in promoting consumption and local economic growth, while also contributing to sustainable human resource development.

Keywords: Intervention; MSMEs; Nutrition; Productivity; Welfare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Subsidized Program for Poor Groups (SPPG) dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja kelas bawah di Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap gizi, pendidikan, dan ekonomi. Program MBG dan SPPG hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah melalui kebijakan sosial yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada 25 keluarga penerima manfaat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas keluarga melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Selain itu, pengurangan beban pengeluaran pangan memungkinkan rumah tangga mengalokasikan sumber daya ke sektor yang lebih produktif, seperti pendidikan dan usaha kecil. Program ini juga memiliki dampak terhadap peningkatan peredaran uang di tingkat lokal melalui keterlibatan UMKM dalam distribusi bantuan. Namun, efektivitas program masih menghadapi tantangan seperti ketepatan sasaran, keterbatasan manajemen, dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait gizi. Secara keseluruhan, program MBG dan SPPG sejalan dengan teori Keynesian dalam mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi lokal serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesejahteraan; intervensi; gizi; produktivitas ; UMKM.

PENDAHULUAN

Selain memberikan dampak ekonomi, program MBG dan SPPG juga berpotensi meningkatkan kualitas modal manusia (*human capital*) yang menjadi faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan gizi yang memadai sejak usia dini berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas individu di masa depan. Di sisi lain, keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok program turut menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan secara langsung, tetapi juga oleh masyarakat sekitar melalui peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Kondisi ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusif yang menekankan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada perbaikan gizi dan perlindungan sosial dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan beban kemiskinan (Anwar Chairil, 2024).

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja kelas bawah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan terutama pemenuhan gizi yang layak menjadi faktor utama yang memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kualitas SDM yang rendah berimplikasi langsung terhadap produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi nasional. Studi menunjukkan bahwa kekurangan gizi kronis tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menurunkan kapasitas kognitif dan produktivitas jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi yang terintegrasi antara aspek kesehatan dan ekonomi menjadi sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan struktural tersebut (Rasyidi *et al.*, 2021).

Respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia sejak tahun 2025 menginisiasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan *Subsidized Program for Poor Groups* (SPPG) sebagai bentuk kebijakan sosial yang bersifat komprehensif. Program MBG difokuskan pada penyediaan asupan gizi yang cukup bagi kelompok rentan seperti anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan keluarga berpenghasilan rendah, yang selama ini menjadi kelompok paling terdampak kerawanan pangan. Sementara itu, SPPG diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui skema subsidi dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *social protection* yang menekankan pentingnya perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan demikian, kedua program ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berorientasi pada pembangunan kapasitas jangka panjang (Mustaqima *et al.*, 2023).

Sudut pandang ekonomi makro dan regional, implementasi program MBG dan SPPG memiliki potensi multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Distribusi anggaran program yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam penyediaan bahan pangan dan jasa pendukung, dapat meningkatkan peredaran uang di tingkat daerah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan permintaan agregat dan penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja dari kalangan kelas bawah. Penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial berbasis pangan dan subsidi dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, efektivitas dampak ekonomi ini sangat bergantung pada desain kebijakan, mekanisme distribusi, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program (Meidiana and Helmi, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi program MBG dan SPPG juga dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan teknis. Permasalahan seperti ketepatan sasaran penerima, transparansi distribusi, keterbatasan anggaran, serta risiko ketergantungan terhadap bantuan pemerintah menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan. Selain itu, keberlanjutan program dalam jangka panjang memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis sejauh mana program MBG dan SPPG mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja kelas bawah, baik dari aspek pemenuhan gizi maupun peningkatan kapasitas ekonomi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Sulistyowati *et al.*, 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori John Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest and Money menekankan bahwa perekonomian tidak selalu berada dalam kondisi keseimbangan penuh, sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk mendorong permintaan agregat. Dalam konteks ini, pengeluaran pemerintah seperti subsidi pangan dan program bantuan sosial memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Pendekatan ini diperkuat oleh pandangan N. Gregory Mankiw yang menyatakan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro. Studi empiris menunjukkan bahwa program bantuan sosial dapat meningkatkan konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga miskin, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Sulistyowati *et al.*, 2024).

Selain perspektif makroekonomi, konsep pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*) menjadi landasan penting dalam memahami dampak program MBG dan SPPG terhadap kesejahteraan

masyarakat. Naila Kabeer mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses di mana individu memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan strategis dalam hidupnya, termasuk akses terhadap sumber daya ekonomi dan kontrol atas pendapatan. Dalam konteks ini, program bantuan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas individu dalam berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis bantuan sosial yang disertai dengan pemberdayaan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan (Nurhayati, 2025).

Lebih lanjut, dalam kerangka *social protection*, program seperti MBG dan SPPG dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan sosial adaptif yang bertujuan untuk mengurangi risiko ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Program perlindungan sosial modern tidak hanya berfokus pada bantuan tunai atau natura, tetapi juga mengintegrasikan aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti perbaikan gizi dan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa program bantuan pangan dan transfer sosial memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi, kesehatan, serta partisipasi ekonomi masyarakat miskin (Alderman & Bundy, 2012; Gentilini, 2019). Dengan demikian, keberadaan MBG dan SPPG dapat dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif yang menggabungkan aspek ekonomi dan sosial (Sulistyowati *et al.*, 2024).

Dalam konteks lokal, implementasi program MBG dan SPPG juga berkaitan erat dengan konsep *multiplier effect* dalam ekonomi regional. Ketika bantuan pemerintah disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang melibatkan pelaku usaha lokal, maka akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat komunitas. Peredaran uang yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara tidak langsung. Penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial berbasis komunitas dapat menghasilkan dampak ekonomi yang luas, termasuk peningkatan permintaan lokal dan penguatan ekonomi daerah (Handa et al., 2018; Hidrobo et al., 2014). Oleh karena itu, efektivitas MBG dan SPPG tidak hanya diukur dari aspek sosial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap dinamika ekonomi lokal (Meidiana and Helmi, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dampak implementasi program MBG (Makanan Bergizi Gratis) dan SPPG (Subsidized Program for Poor Groups) terhadap kesejahteraan keluarga pekerja kelas bawah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman subjektif, persepsi, serta dinamika sosial-ekonomi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Studi kasus difokuskan pada 25 keluarga penerima manfaat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu, seperti status ekonomi, keterlibatan dalam program, serta keberlanjutan penerimaan bantuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual mengenai implementasi program dalam kehidupan nyata (Rijal, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap kepala keluarga dan anggota rumah tangga untuk menggali informasi terkait perubahan kondisi ekonomi, pola konsumsi, serta persepsi terhadap manfaat program. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami secara langsung aktivitas sehari-hari responden, termasuk pemanfaatan bantuan MBG dan dampaknya terhadap perilaku ekonomi keluarga. Selain itu, dokumentasi administrasi program seperti data penerima, laporan distribusi, dan catatan kegiatan digunakan sebagai data pendukung untuk meningkatkan validitas penelitian. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan triangulatif (Rijal, 2021).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tematik yang dikembangkan oleh Virginia Braun dan Victoria Clarke. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu transkripsi data, pengkodean awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta interpretasi hasil. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang berkaitan dengan perubahan kesejahteraan keluarga, peningkatan kapasitas ekonomi, serta dinamika peredaran uang di lingkungan lokal sebagai dampak dari program MBG dan SPPG. Pendekatan tematik dipilih karena fleksibel dan mampu mengungkap makna mendalam dari data kualitatif yang kompleks (Rijal, 2021).

Bisa menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, serta *member check* kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman responden. Transferabilitas dicapai dengan memberikan deskripsi kontekstual yang rinci mengenai lokasi dan karakteristik responden, sehingga memungkinkan pembaca memahami relevansi hasil penelitian dalam konteks lain. Dependabilitas dan konfirmabilitas dijaga melalui audit trail dan dokumentasi proses penelitian secara sistematis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Rijal, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Manfaat MBG terhadap Kesejahteraan Keluarga Pekerja Kelas Bawah

Program MBG (Makanan Bergizi Gratis) terbukti memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga penerima, khususnya dalam aspek kesehatan dan ketahanan pangan rumah tangga. Akses terhadap makanan bergizi yang lebih baik meningkatkan asupan protein, vitamin, dan mineral yang selama ini sulit dipenuhi oleh keluarga berpenghasilan rendah. Peningkatan kualitas gizi ini berimplikasi pada

perbaikan kondisi kesehatan anggota keluarga, termasuk meningkatnya daya tahan tubuh serta menurunnya frekuensi penyakit ringan. Dalam konteks ekonomi tenaga kerja, kondisi kesehatan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja dan pengurangan tingkat absensi, sehingga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga (Eka *et al.*, 2026).

Selain itu, program MBG juga memberikan efek tidak langsung berupa pengurangan beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan. Dengan adanya bantuan makanan, keluarga dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan lain yang lebih produktif, seperti pendidikan anak, tabungan, atau modal usaha kecil. Pergeseran pola alokasi pengeluaran ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga, yang menjadi salah satu indikator penting dalam kesejahteraan. Temuan ini sejalan dengan konsep *economic resilience*, di mana rumah tangga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Syamola and Nurwahyuni, 2019).

4.2. Potensi dan Tantangan MBG dalam Pemberdayaan Ekonomi

Dari perspektif pembangunan ekonomi, program MBG memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, terutama jika diintegrasikan dengan program pendukung seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan penguatan kapasitas lokal. Program ini dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan partisipasi ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok pekerja kelas bawah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dengan dukungan yang tepat, MBG dapat berkembang dari sekadar program bantuan menjadi program pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat (Zahirah *et al.*, 2026).

Namun demikian, implementasi program ini tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan operasional. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakmerataan distribusi bantuan, yang dapat menyebabkan sebagian kelompok sasaran tidak menerima manfaat secara optimal. Selain itu, kapasitas manajemen program di tingkat lokal masih terbatas, baik dalam hal koordinasi, pengawasan, maupun evaluasi program. Rendahnya tingkat literasi gizi di kalangan masyarakat juga menjadi kendala, karena dapat mengurangi efektivitas pemanfaatan bantuan yang diberikan. Studi menunjukkan bahwa keberhasilan program intervensi gizi sangat dipengaruhi oleh faktor edukasi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam pelaksanaan program (Basuki *et al.*, 2026).

3. Kaitan MBG dengan Peredaran Uang di Daerah

Program MBG dan SPPG juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika ekonomi lokal, khususnya dalam meningkatkan peredaran uang di tingkat komunitas. Bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk makanan maupun dukungan ekonomi, mendorong aktivitas transaksi di pasar lokal, terutama jika melibatkan pelaku usaha kecil dan UMKM sebagai penyedia bahan pangan. Hal ini menciptakan siklus ekonomi yang saling menguntungkan antara penerima manfaat dan pelaku usaha lokal, sehingga memperkuat struktur ekonomi daerah. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk lokal, pendapatan pelaku usaha kecil juga mengalami peningkatan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja (Zahirah *et al.*, 2026).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *multiplier effect* dalam teori Keynesian, di mana peningkatan konsumsi rumah tangga akan menghasilkan dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan pengeluaran akan menciptakan pendapatan bagi pihak lain, yang kemudian akan kembali dibelanjakan dalam perekonomian. Dengan demikian, program MBG tidak hanya memberikan manfaat pada tingkat individu, tetapi juga berperan sebagai stimulus ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih luas (Parikesit & Yudithadewi, 2026). Oleh karena itu, keberlanjutan dan optimalisasi program ini menjadi penting untuk memastikan dampak ekonomi yang lebih signifikan dan berkelanjutan (Nurul Pajriah *et al.*, 2025).

KESIMPULAN

Program MBG (Makanan Bergizi Gratis) dan SPPG (Subsidized Program for Poor Groups) menunjukkan peran yang signifikan sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja kelas bawah. Peningkatan akses terhadap makanan bergizi terbukti mampu memperbaiki kualitas kesehatan keluarga penerima, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan produktivitas kerja dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, berkurangnya beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan memberikan ruang bagi rumah tangga untuk mengalokasikan sumber daya finansial ke sektor yang lebih produktif, seperti pendidikan dan usaha ekonomi.

Program ini juga memiliki potensi strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan pelaku usaha kecil dan UMKM dalam rantai distribusi program menciptakan peluang peningkatan pendapatan serta memperluas aktivitas ekonomi di tingkat komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa MBG dan SPPG tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi inklusif yang mampu memperkuat struktur ekonomi daerah. Dengan pendekatan yang tepat, program ini berpotensi menjadi model intervensi yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi.

Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketepatan sasaran distribusi, keterbatasan kapasitas manajemen di tingkat lokal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya gizi seimbang. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan sistem pengawasan, serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan. Tanpa perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, potensi optimal program dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan sepenuhnya tercapai.

Secara keseluruhan, dampak ekonomi yang tercermin melalui peningkatan peredaran uang di tingkat lokal memperkuat relevansi program ini dengan prinsip ekonomi Keynesian, yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam mendorong permintaan agregat. Program MBG dan SPPG terbukti tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi mikro dan pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, keberlanjutan dan pengembangan program ini menjadi penting sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Secara khusus, peneliti menyampaikan apresiasi kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan berlangsung.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, yang telah memberikan izin penelitian serta dukungan dalam proses pengumpulan data di lapangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

Anwar Chairil, A.A.N. (2024), “Penyuluhan Perpajakan untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak di Kalangan Milenial Melalui Pengabdian Praktek Kerja Lapangan di KPP Pratama Sidoarjo Utara”, *Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 2, pp. 12–21.

Basuki, R.M., Muharrom, N.W. and Kusuma, N.A. (2026), “Implementasi Program Makan Bergizi Gratis : Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional”, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 1, pp. 1413–1423, doi: https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3208.

Eka, F.M., Halimah, Z.N. and Hapsari, Y.I. (2026), “ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Marliana Eka Fauzia”, *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 10 No. 1, pp. 182–193, doi: https://doi.org/10.22437/jisipunja.v10i1.53925.

Meidiana, A. and Helmi, C. (2024), “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Komunikasi dan Perubahan Sosial Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 3, pp. 1–9, doi: 10.47134/jpem.v1i3.352.

Mustaqima, S., Ramadhani, E., Hadi, A.F. and Sartono, B. (2023), “Identifikasi Karakteristik Kasus Rawan Pangan Di Provinsi Aceh Pada Penerima Program Bantuan Sosial”, *JURNAL ILMIAH BASIS EKONOMI DAN BISNIS*, Vol. 2 No. 1, pp. 32–40, doi: https://doi.org/10.22373/jibes.v2i1.2524.

Nurhayati, E. (2025), “Integrasi Perspektif Sosiologi dan Kesejahteraan Sosial dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Rentan ” Studi Literatur Komprehensif yang diwarnai oleh perubahan sosial , ekonomi , politik , dan teknologi yang cepat . Kelompok mengakses sumber daya dan kesempa”, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, Dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, pp. 1–22.

Nurul Pajriah, P., Sulaksana, J. and Umyati, S. (2025), “Dampak Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal”, *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)*, Vol. 8 No. 1, pp. 203–212, doi: 10.52434/mja.v8i1.42443.

Rasyidi, M.F., Mahmudiono, T. and Rachmah, Q. (2021), “Hubungan antara Status Gizi, Risiko Anemia, dan Ketahanan Pangan dengan Produktivitas Pekerja Bangunan Correlation between Nutritional Status, Risk of Anemia, and Food Security with Construction Workers Productivity”, *Media Gizi Kesmas*, Vol. 10 No. 1, pp. 1–6, doi: https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.40-46.

Rijal, F.M. (2021), “Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia”, *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21 No. 1, pp. 33–54, doi: 10.21831/hum.v21i1.

Sulistyowati, F., Saptaning Tyas, H., Widati, W. and Puspitasari, C. (2024), “Utopia Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat”, *Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 13 No. 3, pp. 214–224, doi: 10.33007/ska.v13i3.3389.

Syamola, D. and Nurwahyuni, A. (2019), “Determinan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Daerah Pedesaan di Indonesia (Analisis Data Susenas Tahun 2017) Determinants of Household Food Security in Rural Areas in Indonesia (Susenas Data Analysis , 2017)”, *Jurnal MKMI*, Vol. 15 No. 1, pp. 46–54, doi: http://dx.doi.org/10.30597/mkmi.v15i1.5880.

Zahirah, N., Dwizultara, H., Pratiwi, A., Rejeki, T.C. and Azwari, P.C. (2026), “Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 4, pp. 4226–4242, doi: https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.69165.